

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Indonesia terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Pembangunan daerah dan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber ekonomi secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuan atas dirinya.

Landasan pemikiran mengenai peraturan tentang desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi daerah, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat (widjaja,2003). Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dan juga mencerminkan pemerintah desa sebagai pemerintah terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa secara mandiri, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan cepat.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk dalam kelompok transfer

pendapatan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.

Sumber pendapatan desa, selain dari Alokasi Dana Desa juga dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Dimana dalam kelompok transfer dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa(DD), bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah serta bantuan keuangan provinsi dan kabupaten. Sebelum adanya Dana Desa, Alokasi Dana Desa menjadi sangat penting dalam pembangunan pedesaan, sementara pendapatan desa lainnya kurang berdampak pada pembangunan pedesaan.

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat dalam artian lain desa telah didukung penuh dan diharapkan menjadi mandiri dan sejahtera. Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri No 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 maret 2005 tentang pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa adapun tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa antara lain meliputi :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut juga disebutkan juga perhitunganbesaran ADD yang disalurkan kepada desa harus berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk miskin, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa (jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan), jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa.

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah desa ternyata masih memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada pengelolaan pemerintahannya, keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006:96) menyatakan bahwa unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksanaan baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional.
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas, dan pekerjaan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Girimoyo kabupaten Malang terhadap pemberdayaan masyarakat ?
2. Bagaimana peran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan di Desa Girimoyo ?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Girimoyo ?

1.3. Batasan Masalah

Permemberian Alokasi Dana Desa ternyata memiliki keterbatasan dalam pengelolaannya, dimana Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan pembangunan desa. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dengan adanya Alokasi Dana Desa ternyata belum sepenuhnya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perubahan akan pembangunan desa. Hal ini disebabkan banyaknya permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, seperti rendahnya kualitas sumber daya aparatur desa, rendahnya pendapatan, rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa dan

rendahnya pendapatan asli desa. Sedangkan masyarakat dan aparat pemerintah desa merupakan unsur penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Girimoyo.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Girimoyo.
2. Menganalisa peran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Girimoyo.
3. Menganalisis faktor penghambat dan pendukung penggunaan ADD di Desa Girimoyo.

1.4.2. Kegunaan Penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pembangunan pedesaan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak terkait.